BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat diiringi dengan perkembangan internet [1]. Teknologi merubah paradigma masyarakat dalam hal mencari dan memperoleh informasi tanpa batasan apapun. Perkembangan tersebut menuntut manusia, agar dapat mengikuti dengan menerapkan di berbagai aspek kegiatan terutama dalam hal pengolahan data dan sistem infromasi [2]. Teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin, salah satunya digitalisasi sistem informasi pada bidang tata kelola pemerintahan.

Sistem Informasi Desa atau selanjutnya disingkat dengan SID merupakan contoh pemanfaatan teknologi dalam bidang pelayanan publik yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. SID diharapkan dapat membantu pemerintah desa juga warga dalam dokumentasi informasi dari data milik desa [3]. Kabupaten Purbalingga merupakan kabupaten yang juga memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), dimana memiliki banyak tugas dan kewenang. Salah satu dari program dan kegiatannya adalah membangun SID dari Kabupaten Purbalingga termasuk Desa Grecol, Kecamatan Kalimanah.

SID harus dapat diakses oleh semua kalangan, contohnya seperti website. Website dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akses internet dimanapun dan kapanpun. WordPress adalah sebuah platform dalam pembuatan website yang bersifat *open source* sebagai *Content Management System* (CMS) yang gratis dan dapat dimodifikasi sesuai keperluan dengan fitur yang bernama *plugin*. Kelebihan WordPress diantaranya adalah CMS dengan penggunaan terbanyak, fleksibel karena mudah digunakan, link management terintegerasi, dan fasilitas anti spam [4]. Penggunaan CMS bermaksud agar website dapat dikembangkan bersamasama, karena informasi akan berkembang dan bertambah siring berjalannya waktu [2].

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya kegiatan rancang bangun rancang bangun website sistem informasi desa grecol kabupaten purbalingga berbasis wordpress ini adalah merancang sebuah website sistem informasi Desa Grecol, Kabupaten Purbalingga berbasis WordPress.

1.3 Ruang Lingkup

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga memiliki bidang Informatika yang dibagi lagi menjadi dua seksi didalamnya. Seksi yang pertama dalam bidang Informatika adalah seksi aplikasi dan infrastruktur TIK, sedangkan yang kedua adalah seksi tata kelola E-government. Dalam pelaksanaan PKL ditempatkan pada bidang informatika dalam seksi aplikasi infrastruktur TIK untuk membangun sebuah web di ruangan yang disediakan.

1.4 Aspek Umum dan Kelembagaan

1.4.1 Profil Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga merupakan organisasi tingkat daerah yang berperan dalam hal penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunnaan TIK, serta pengendalian layanan jasa Pos dan Telekomunikasi yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara terbuka dan responsif di bidang komunikasi dan informatika.

Pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak masyarakat dalam hal perolehan informasi. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan terwujudnya implementasi E-government bagi pemerintahannya. Melalui kepentingan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk sebuah Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 30 Mei 2016 dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang "Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga" dan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga".

Berbagai media informasi perlu lebih didayagunakan dan diberdayakan agar informasi dapat tersebar secara luas dan merata, cepat, dan mudah diakses. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya managemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah. Secara teknis hal tersebut mudah untuk dilakukan, namun faktor non teknis masih menjadi kendala dalam pengimplementasiannya.

1.4.2 Visi & Misi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

a. Visi

Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dengan Berbasis Teknologi dan Informatika.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- 2) Menyediakan daya dukung layanan infrastruktur, informasi dan sarana prasarana komunikasi dan informatika.
- 3) Meningkatkan pengawasan kualitas infrastruktur jaringan pos dan telekomunikasi dengan pemenuhan kebutuhan aplikasi dan pengelolaan informasi publik yang akurat.
- 4) Menjadi pusat data dan akses keamanan informasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan kemitraan, dan lembaga komunikasi dalam penyebaran informasi publik berbasis kearifan lokal.
- 6) Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga.
- 7) Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA KEPALA DINAS SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIDANG HUMAS DAN INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG SANDI, STATISTIK DAN BIDANG INFORMATIKA TELEKOMUNIKASI SEKSI APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR TIK SEKSI DESIMINASI SEKSI INFORMASI PERSANDIAN STATISTIK SEKSI TELEKOMUNIKASI UPTD

1.4.3 Struktur Organisasi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinkominfo Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- 1) Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah,
- 2) Sub Urusan Aplikasi Informatika yaitu:
 - a) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah,
 - b) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah.
- 3) Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu:
 - a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.
 - b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- 4) Sub Urusan Statistik Sektoral yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Dinkominfo Purbalingga juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinkominfo Purbalingga mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika,
 Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi
 Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi,
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- 6) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.5 Metode Penulisan Laporan

Dalam penyusunan laporan data dapat diperoleh melalui metode:

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan. Metode yang dilakukan tersebut berupa wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

2. Metode Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan laporan praktik kerja didapatkan secara primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan yang dilakukan di tempat PMI Kabupaten Purbalingga. Sedangkan, data sekunder didapatkan melalui dokumentasi dan sumber yang sudah ada sebelumnya.

3. Metode Diskusi

Metode diskusi dilakukan dengan cara melakukan sesi tanya jawab dan berdiskusi dengan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah dalam melakukan pekerjaan.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk memudahkan penyusunan laporan dan pemahaman mengenai kandungan isi didalamnya, maka laporan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian atau gambaran secara umum tentang apa yang akan dikerjakan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik dan apa yang menjadi pokok kegiatannya.

BAB II DASAR TEORI

Berisi tentang teori-teori yang diambil pada Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik sebagai bahan dasar pengetahuan.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan teori dan konsep-konsep kerja diambil pada Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan hasil yang diperoleh dari Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik dan saran yang ditujukkan untuk pembaca.